

MODEL DETEKSI KECURANGAN BERBASIS *FRAUD TRIANGLE* (Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia)

Sukirman
Maylia Pramono Sari
Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

The case of issuers violation in stock market is one of the most frequent case that should be solved by the stock market's Regulator Board. In Indonesia, the authority to do the surveillance in stock exchanges is handled by the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (or called 'Bapepam-LK' in Indonesian). There is a gap between society's expectation toward Bapepam-LK as the regulator and its performance in solving several companies violation cases which demands some alternative solutions. Based on the above description, this study will empirically investigate the development of fraud detection model using fraud triangle based on the cases of violation committed by public companies in Indonesia. In detail, the problems in this research are: (1) Is there any difference related to the triggering factors of Fraud Triangle between the company that commits fraud and the company that does not; (2) Is there any difference in terms of pressure between the company that commits fraud and the company that does not; (3) Is there any difference in terms of opportunity between the company that commits fraud and the company that does not; (4) Is there any difference in terms of rationalization between the company that commits fraud and the company that does not. This research was carried out to the public companies who are registered in Indonesia Stock Exchanges (BEJ). Generally, there are two sample group in this research. The first sample group consisted of the companies who had committed fraud and the second group as comparison consisted of the non-fraud companies. In this research there are 98 companies as the research samples which consisted of 23 companies who had committed fraud and 75 companies who did not commit fraud. The analysis tool used for this research was logistic regression because the measurements of dependent variable used the categorical that is dummy variable, code (0) was used for the non-fraud companies and code (1) was used to indicate the companies who committed fraud. The research result shows that from four hypothesis proposed in this research, only one variable which fits in to the model (variable in equation) because possesses the significance score above 0.05. The interpretation is that the higher the audit report (rationalization), will make the company's probability to commit fraud is also higher. From the above explanation, it can be concluded that the fourth hypothesis (H4) is accepted because the audit report (rationalization) is proven to have the ability in forming the model to predict fraud in a company.

Keywords: fraud, fraud triangle

PENDAHULUAN

Kasus pelanggaran emiten di pasar modal merupakan salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh badan regulator di

bidang pasar modal. Di Indonesia, wewenang untuk melakukan pengawasan di bursa efek dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Sebagai otoritas pengawas bursa, Bapepam-LK telah mengeluarkan berbagai aturan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga sistem perdagangan yang fair dan terbuka. Namun demikian, dalam praktiknya pelanggaran aturan Bapepam-LK masih cukup tinggi. Akibatnya, berbagai tindakan dikenakan oleh Bapepam-LK terhadap para emiten. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil penawaran umum dan lain-lain. Tindakan yang dikenakan bergantung kepada jenis dan intensitas pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran yang bersifat administratif biasanya dikenakan tindakan berupa denda. Sedangkan pelanggaran yang relatif lebih berat seperti pelanggaran tindak pidana akan dikenakan tindakan hukum.

Sepanjang 2011, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memeriksa 178 kasus dugaan pelanggaran di bidang pasar modal ditambah penyidikan pada 12 kasus dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Kedua tindakan dilakukan berdasarkan UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 100 dan 101. Kasus-kasus yang ditangani antara

lain kasus yang terkait dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik, perdagangan efek, dan pengelolaan investasi. Kasus terkait dengan keterbukaan emiten yaitu antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil penawaran umum, dan lain-lain. Kasus yang terkait dengan perdagangan efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, dan perdagangan orang dalam. Sedangkan, kasus yang terkait dengan pengelolaan investasi antara lain pelanggaran perilaku oleh manajer investasi. Dari 178 kasus tersebut, 73 kasus di antaranya telah selesai diproses. Sedangkan sisanya sebanyak 33 kasus telah dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK, baik dalam bentuk sanksi administratif atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Selain dugaan pelanggaran peraturan, hingga saat ini Bapepam-LK juga sudah melakukan penyidikan terhadap 12 kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal. Itu berdasarkan kewenangan Bapepam-LK yang diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Selama tahun 2011, bentuk sanksi yang ditetapkan oleh Bapepam-LK pun beragam. Mulai dari pencabutan izin usaha

baik terhadap institusi maupun perseorangan, pembekuan izin usaha, sanksi denda serta peringatan tertulis. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Bapepam-LK melakukan paparan publik melalui *press-release*, menyampaikan data sanksi yang telah ditetapkan, khususnya terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Sepanjang 2011, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengenakan denda administratif kepada pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebesar Rp14,93 miliar atau mengalami kenaikan 16,27 persen dari 2010 sebesar Rp12,84 miliar. Adapun jumlah pihak yang dikenakan denda

juga meningkat dari 420 menjadi 430 pihak. Dijelaskan dalam siaran pers tersebut, sebesar Rp14,93 miliar itu terbagi atas 217 emiten yang dikenakan denda sebesar Rp 10,65 miliar. Kemudian sebesar Rp398,90 juta untuk 17 manajer investasi (MI), satu wakil MI Rp2,80 juta, empat perorangan Rp706,60 juta, lalu 46 perusahaan efek Rp1,07 miliar. Di sisi lain, Bapepam-LK juga telah mencabut izin usaha dari 28 perusahaan efek sepanjang 2011 atau naik jumlahnya dari tahun lalu yang hanya 10 perusahaan. Adapun ke-28 perusahaan itu merupakan 11 perantara pedagang efek (PPE), delapan MI, dua wakil perantara pedagang efek, tiga wakil penjamin emisi efek, dan empat wakil MI.

Tabel. 1.1. Sanksi BAPEPAM-LK di Tahun 2011

Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pembatasan Kegiatan Usaha	Pembekuan Kegiatan Usaha	Pencabutan izin usaha
	Pihak	Jml Pihak Rp (000)				
Emiten	217	10.652.300	37	-	-	-
Perusahaan Efek	46	1.075.400	1	-	1	11
Perantara Pedagang Efek	15	82.300	-	-	-	-
Penjamin Emisi Efek	24	1.446.000	-	-	-	-
Manajer Investasi	17	398.900	4	-	-	8
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Lembaga Kliring dan Penjaminan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pemeringkat Efek	1	500	-	-	-	-
Akuntan Publik	82	470.700	2	-	-	-
Penilai	20	74.300	-	-	-	-
Biro Administrasi Efek	3	20.300	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Bank Kustodian	-	-	1	-	-	-
Wakil Perusahaan Efek	-	-	-	-	2	-

Wakil Perantara	-	-	-	-	2	2
Pedagang Efek						
Wakil Penjamin Emisi Efek	-	-	-	-	1	3
Wakil Manajer Investasi	1	2.800	1	-	1	4
Perorangan	4	706.600	-	-	-	-
Jumlah	430	14.930.100	46	-	7	28

Sumber : data pemaparan Bapepam-LK

Menurut Direktur Utama BEI Ito Warsito, tindakan tegas berupa pemberian sanksi pada emiten merupakan hal wajar. “Tindakan tegas pada emiten yang keliru menyajikan laporan keuangan juga bagian dari tindakan bursa,” kata Ito. Selain itu, pada tahun 2010, BEI juga melakukan suspensi pada salah satu Emiten karena Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dimiliki perusahaan tidak memenuhi aturan. Tindakan tegas yang dilakukan regulator dianggap merupakan sinyal penting bagi pasar untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap investasi mereka. Investor baik perorangan dan institusi akan selalu memilih saham perusahaan yang memiliki return yang optimal menurut preferensi risiko masing-masing investor. Akan tetapi, saham yang prospektif mestinya juga harus diimbangi dengan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Transparansi atau tingkat keterbukaan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya sebagai salah satu pilar tata kelola harus selalu dikomunikasikan kepada pasar. Apabila hal tersebut belum terlaksana dengan baik, maka investor tidak pernah memiliki

informasi yang benar mengenai kinerja perusahaan publik sesungguhnya. Problem inilah yang disebut sebagai asimetri informasi.

Terjadinya asimetri informasi di-sinyalir merupakan indikasi awal munculnya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bursa. Perusahaan publik yang seharusnya memberikan informasi yang transparan kepada pihak luar, terkadang masih menyembunyikan fakta dan informasi yang memiliki pengaruh buruk terhadap reputasi perusahaan mereka. Manajemen perusahaan yang lebih tahu mengenai kondisi internal perusahaan berupaya melakukan berbagai cara agar kinerja mereka tetap dinilai baik bahkan meskipun harus melakukan tindakan yang melanggar aturan bursa.

Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa tata kelola organisasi sektor privat maupun sektor publik belum terlaksana dengan baik. Beberapa kasus besar di sektor privat terkait dengan kegagalan corporate governance international (seperti Enron, World Com, Parmalat) maupun di Indonesia (Bank Indonesia) telah menarik perhatian baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan di

sektor publik khususnya di Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang telah dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan pada Semester II Tahun 2010 atas 734 objek pemeriksaan yang terdiri dari 159 objek pemeriksaan keuangan, 147 objek pemeriksaan kinerja, dan 428 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu menunjukkan bahwa jumlah temuan sebanyak 6.355 kasus senilai Rp6,46 triliun dan USD156.43 juta. Akibat yang ditimbulkan dari berbagai tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perseroan sangatlah besar. Disamping kerugian materiil yang mencapai trilyunan rupiah, kredibilitas Indonesia di mata investor luar juga menurun. Disisi lain, ketegasan pihak aparat hukum dan regulator pasar modal untuk mengambil tindakan yang tegas belum memberikan rasa kepuasan dan keadilan bagi masyarakat. Terkadang kasus kecurangan yang besar hanya menghasilkan tindakan hukum yang ringan atau bahkan hanya tindakan administratif saja.

Tindakan-tindakan pelanggaran sebagai salah satu bentuk kecurangan merupakan fenomena yang perlu dikaji lebih mendalam. Menurut pendekatan *fraud triangle* (Cressey, 1953), suatu kecurangan hanya akan muncul sebagai akibat tiga kondisi, yaitu kesempatan, tekanan dan rasionalisasi. Secara simultan ketiga hal tersebut akan mendorong suatu pihak untuk berada pada satu kondisi moral hazard yang menjustifikasi tindakan kecurangan. Meskipun teori segitiga *fraud* sangat

populer untuk membedah kasus kecurangan, penerapan metode ini untuk mengkaji kasus pelanggaran emiten di Indonesia masih sangat jarang dilakukan.

Kondisi di atas memotivasi penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam mengenai praktik pengungkapan kasus pelanggaran perusahaan publik di Indonesia. Penelitian sejenis yang komprehensif di Indonesia masih jarang dilakukan untuk mengungkap lebih mendalam misteri dibalik berbagai macam skandal perseroan yang dilakukan oleh perusahaan publik.

Perkembangan dunia bisnis yang cepat selama satu dasawarsa terakhir telah menimbulkan kebutuhan terhadap pengelolaan perusahaan yang berbasiskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berbagai skandal korporasi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan betapa pihak perusahaan memiliki ambisi untuk memuaskan ekspektasi utilitas mereka sendiri dalam memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Kasus kebangkrutan Enron di Amerika Serikat misalnya, disinyalir akibat keserakahan manajemen dalam menyajikan angka-angka laporan keuangan yang manipulatif dengan berbagai trik perekayasaan transaksi bisnis perusahaan. Motifnya adalah menyembunyikan transaksi yang cenderung merugikan yang terkait dengan pihak internal perusahaan dan hanya mengungkapkan kinerja yang bagus saja

kepada pihak eksternal. Berbagai macam trik manipulasi keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen Enron merupakan contoh nyata kecurangan manajemen dan kecurangan keuangan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi.

Kasus serupa ternyata berulang di Eropa dengan munculnya kasus kebangkrutan Parmalat, sebuah konglomerasi keluarga di Italia. Pihak keluarga Tanzil sebagai pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas mencoba menyembunyikan hutang perusahaan yang kelewat besar melalui transfer antar perusahaan didalam satu grup bisnis (McCahery & Vermeulen, 2005) yang bersifat manipulatif.

Dalam ranah domestik, kasus dengan motif serupa sebenarnya juga banyak dilakukan oleh perusahaan konglomerasi. Bahkan, kalau dirunut ke belakang sebenarnya krisis ekonomi tahun 1997 banyak diakibatkan oleh tindakan manipulasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dan manajemen perseroan. Banyak konglomerat yang mendirikan bank tetapi kemudian menyalurkan dana dari masyarakat ke berbagai perusahaan didalam grup bisnis mereka. Ibaratnya bank hanya sebagai sapi perahan (*cash cow*) untuk memperoleh dana segar yang digelontorkan ke kalangan internal grup bisnis. Dengan cara inilah kemudian berbagai transaksi internal didalam grup bisnis dilakukan perseroan untuk menyembunyikan manipulasi tersebut. Meskipun krisis telah

berlalu dan pengetatan perbankan telah dilakukan oleh Bank Indonesia, ternyata terdapat cara lain untuk memperkaya perseroan dengan mengambil dana dari pihak luar secara lebih halus. Banyaknya skandal kecurangan di perbankan seperti kasus bank Century dan bank Mega sampai mendorong Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan pembatasan kepemilikan bank (BI, 2011).

Berkaitan dengan maraknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan publik, berbagai aturan sebenarnya telah dikeluarkan oleh pihak regulator dalam hal ini Bapepam-LK. Dalam kaitannya dengan transaksi yang potensial menimbulkan konflik kepentingan, Bapepam-LK telah membuat aturan yang mengatur aturan tersebut. Khusus untuk manipulasi laporan keuangan, aturan Bapepam-LK menyatakan bahwa laporan keuangan perseroan mesti diaudit secara independen dan publikasi laporan tahunan harus tepat waktu. Keterlambatan terhadap penyampaian laporan tahunan dianggap mencerminkan kelalaian perseroan dan dikenakan tindakan denda. Pada setiap aksi korporasi, Bapepam-LK juga mewajibkan adanya laporan keterbukaan informasi kepada publik segera setelah transaksi dilakukan untuk menjamin transaksi dilakukan secara fair dan terbuka. Tidak hanya itu, jika Bapepam-LK mengarai ada ketidakwajaran dalam suatu transaksi perdagangan saham akibat suatu manipulasi atau kecurangan Bapepam -LK

akan bertindak cepat dengan menghentikan perdagangan saham perusahaan yang diduga bermasalah tersebut baik secara sementara atau permanen.

Meskipun demikian, didalam prakteknya banyak kritik yang ditujukan kepada Bapepam-LK mengenai masih maraknya kasus pelanggaran yang terjadi. Setiap tahunnya, nilai pelanggaran masih sangat tinggi yang berkisar pada angka ratusan milyar rupiah. Disamping itu, masyarakat sering dikejutkan dengan kasus manipulasi perusahaan yang tiba-tiba muncul dipermukaan dan menimbulkan kepanikan psikologis. Padahal ketika ditelusuri tindakan manipulasi tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang agak lama yang harusnya bisa terdeteksi lebih awal oleh Bapepam-LK selaku pihak pengawas bursa. Belum lagi penanganan terhadap suatu kasus yang ditangani terkesan sangat lambat. Khusus pelanggaran yang bersifat pidana, Bapepam-LK akan bekerjasama dengan pihak penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, PPATK, dan pengadilan. Sudah bukan rahasia lagi kalau kinerja aparat hukum kita masih sangat lemah.

Terdapatnya gap antara harapan masyarakat kepada Bapepam-LK selaku pihak regulator dengan kinerja lembaga tersebut dalam menangani berbagai kasus pelanggaran perseroan perlu segera dicarikan alternatif pemecahannya. Kondisi tersebut memotivasi penelitian ini untuk mengembangkan suatu

model yang dapat melakukan deteksi dan sekaligus prediksi terhadap kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan publik di bursa efek.

Berdasarkan uraian diatas, studi ini akan meneliti secara empiris pengembangan model deteksi kecurangan berbasis *fraud triangle* pada kasus-kasus pelanggaran perusahaan publik di Indonesia. Secara rinci masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan terkait faktor-faktor pembentuk *fraud triangle* antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.
2. Apakah terdapat perbedaan terkait tekanan (*pressure*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.
3. Apakah terdapat perbedaan terkait kesempatan (*opportunity*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.
4. Apakah terdapat perbedaan terkait rasionalisasi/pembenaran (*rationalization*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS *Fraud* (Kecurangan)

Tindakan kecurangan perusahaan (*corporate fraud*) merupakan suatu tindakan

yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen dan atau pemilik perusahaan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator. Secara mendasar, kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu jenis kecurangan yang terjadi di sekitar kita. Pada praktiknya, definisi dari kecurangan sendiri bisa beraneka ragam.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (ACFE, 2003). Merujuk pada definisi tersebut maka secara umum kecurangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang-orang baik dari dalam atau luar organisasi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya yang dapat merugikan pihak lainnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan baik secara spontan maupun direncanakan.

ACFE menggambarkan *fraud* dalam bentuk ranting dan anak rantingnya. *Fraud Tree* ini mempunyai tiga cabang utama, yakni *corruption*, *asset misappropriation* dan *fraudulent statements*: (1) *Corruption* terdiri dari *conflicts of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion*; (2) *Asset*

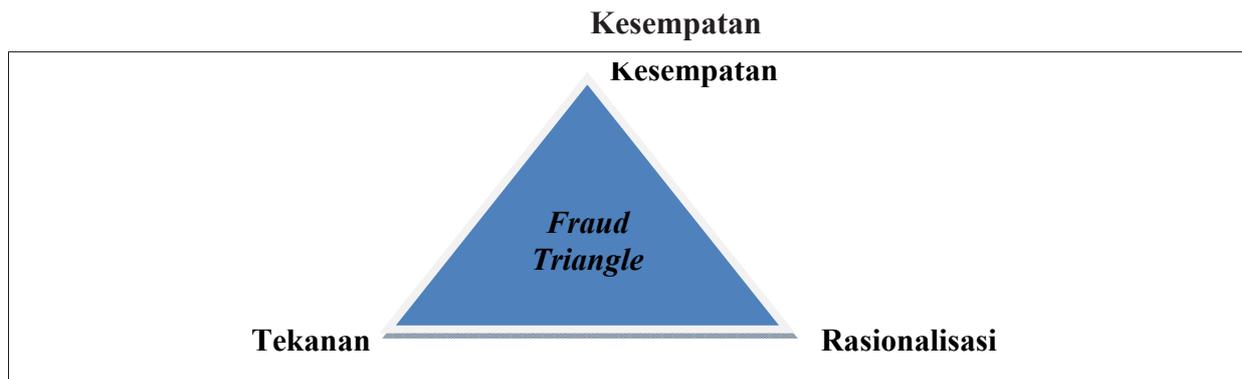
misappropriation di bagi menjadi dua hal yaitu *cash* dan *non-cash*. Bentuk penjarahan *cash* dilakukan dalam tiga bentuk: *skimming*, *larceny* dan *fraudulent disbursements*. Sedangkan modus operandi dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah *misuse* dan *larceny*. (3) *Fraudulent Statements* dibedakan menjadi dua hal yaitu *fraud* dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari *asset/revenue overstatements* dan *asset/revenue understatements*) dan *fraud* dalam menyusun laporan non-keuangan.

Fraud tree ini bermanfaat untuk memetakan *fraud* dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis *fraud* yang terjadi. Ada gejala-gejala “penyakit” *fraud* yang dalam auditing dikenal sebagai red flags. Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi *fraud* tersebut.

Fraud Triangle

Salah satu penjelasan teoritis mengenai tindakan kecurangan disampaikan oleh Cressey (1953). Menurutnya, seseorang bisa melakukan tindakan kecurangan apabila dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan atau insentif (*pressure or incentive*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*).

Gambar 2.1. *Fraud Triangle*



Elemen pertama dari segitiga kecurangan adalah tekanan. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat finansial dan non finansial. Faktor finansial muncul karena keinginan untuk memiliki gaya hidup yang berkecukupan secara materi. Sedangkan faktor non finansial bisa mendorong seseorang melakukan *fraud*, yaitu tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk. Selain itu sifat dasar manusia yang serakah bisa jadi memberikan tekanan secara internal sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan

Faktor kecurangan yang kedua adalah kesempatan. Terbukanya kesempatan ini dikarenakan si pelaku percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Bahkan andaikan aksi seseorang itu diketahui, maka tidak ada tindakan yang serius yang akan diambil. Peluang ini terjadi biasanya terkait dengan lingkungan dimana kecurangan memungkinkan untuk dilakukan. Sistem pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang memadai serta

prosedur yang tidak jelas ikut andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan.

Elemen ketiga dalam tindakan kecurangan adalah rasionalisasi. Hal ini merupakan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan. Para pelaku *fraud* biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menjustifikasi tindakan mereka.

Di Amerika Serikat, badan yang menaungi para pemeriksa eksternal yang independen yaitu *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) mencoba mengadopsi konsep *fraud triangle* kedalam salah standar audit, yaitu SAS No.99 tentang *fraud risk factor*. Dalam lingkup standar tersebut, pihak auditor eksternal perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang potensial menyebabkan klien audit mereka untuk melakukan tindak kecurangan. Berdasarkan tiga pilar kecurangan, apabila auditor menemukan satu pilar saja hal tersebut sudah cukup untuk mengindikasikan potensi terjadi kecurangan. Secara rinci, faktor-faktor risiko

dari ketiga pilar kecurangan berdasarkan SAS 99 dapat dirangkum pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 2.1. Faktor-faktor Risiko Kecurangan berdasarkan SAS No. 99
terkait dengan kasus pelanggaran perusahaan**

Kesempatan	Tekanan	Rasionalisasi
1. Financial stability or profitability is threatened by economic, industry, or entity operating conditions:	1. Industry provides opportunities for	1. Attitudes/rationalizations by board members, management, or employees that allow them to engage in and/or justify fraudulent financial reporting
Related-party transactions beyond ordinary	High degree of competition or declining profit margin	Ineffective communication, implementation, support, or enforcement of ethics
A strong financial presence or ability to dominate a certain industry sector that allows the entity to dictate terms or conditions to suppliers or Customers	High vulnerability to rapid changes (i.e., technology, obsolescence, or interest rates)	Non-financial management's excessive participation in selection of accounting principles or the determining estimates
Accounts based on significant estimates	Declines in customer demand	Known history of violations of securities laws or other laws
Significant, unusual, or highly complex transactions	Operating losses	Excessive interest in maintaining or increasing stock price
Significant operations across international borders environments and cultures	Recurring negative cash flows from operations	Aggressive or unrealistic forecasts
Significant bank accounts in tax-haven jurisdictions	Rapid growth or unusual profitability	Failure to correct known reportable conditions on a timely basis
	New accounting, statutory, or regulatory requirements	Interest by management in employing inappropriate means to min. reported earnings for tax
2. Excessive pressure exists for management to meet requirements of third parties:	2. Ineffective monitoring of management allows:	Recurring attempts by management to justify marginal or inappropriate accounting on the basis of materiality
Profitability/trend expectations	Domination of management by a single person or small group	Strained relationship with current or predecessor auditor
Need to obtain additional debt or equity financing	Ineffective board of directors or audit committee oversight	Frequent disputes with the current or predecessor auditor

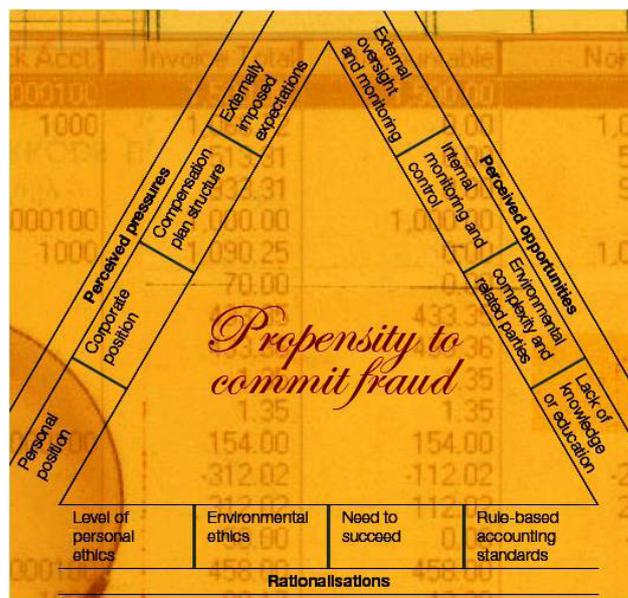
Marginal ability to meet exchange listing requirements or debt repayment or other debt covenant requirements	3. There is a complex or unstable organizational structure	Unreasonable demands on the auditor, such as unreasonable time constraints
Likely poor financial results on significant pending transactions	Difficulty in determining the organization or individuals that have control of company	Restrictions on the auditor that inappropriately limit access
3. Management or directors' personal financial situation is:	Overly complex structure	Domineering management behavior in dealing with the auditor
Significant financial interests in the entity	High turnover of senior management, counsel, or board	
Significant performance based compensation	4. Internal control deficient	
Personal guarantees of debts	Inadequate monitoring of controls	
4. There is excessive pressure on management or operating personnel to meet financial targets setup by directors or management	High turnover rates or employment of ineffective accounting, internal audit, or information technology staff	
	Ineffective accounting and information systems	

Sumber: Skousen *et. al.* (2009)

Pengembangan *fraud triangle* juga dilakukan oleh Albrecht et al (2007) dalam konteks kecurangan keuangan. Menurut mereka, kecenderungan untuk melakukan kecurangan finansial dalam tiga elemen kecurangan dapat dirinci lagi kedalam beberapa motif. Tekanan misalnya, bisa berasal dari dalam diri seseorang atau organisasi dilandasi oleh ambisi tertentu atau bisa karena tekanan dari lingkungan luar. Sedangkan peluang munculnya kecurangan didapat dari celah lemahnya sistem pengawasan internal

serta jaringan dengan lingkungan sekitar yang kompleks. Pada sisi rasionalisasi, aturan standar akuntansi yang terlalu banyak memberikan alternatif pilihan justru menjadi justifikasi bagi pihak manajemen untuk merekayasa angka-angka laporan keuangan. Disamping itu, tingkat etika yang rendah dari pihak manajemen juga ikut menyumbang pembenaran pribadi atas apa yang telah dilakukan. Secara singkat pengembangan *fraud triangle* oleh Albrecht *et. al.* (2007) dapat dilihat dari gambar 2.2 dibawah.

Gambar 2.2. *Propensity to Commit Fraud*



Penelitian Terdahulu

Berbagai macam penelitian empiris dilakukan untuk menerapkan konsep *fraud triangle*. Turner *et. al.* (2003) menguji dampak dari *fraud triangle* terhadap proses audit. Mereka mengembangkan jaringan bukti yang memiliki dua sub-jaringan. Pertama, untuk menangkap risiko dan bukti hubungan untuk audit laporan keuangan konvensional. Kedua, bukti untuk menangkap hubungan risiko dan bukti penilaian kecurangan. Hasil analisis penelitian mendukung konsep *fraud triangle* tentang hubungan ketiga elemen yang memiliki dampak besar terhadap risiko audit.

Penelitian Lou dan Wang (2009) dilakukan untuk menguji faktor risiko dari *fraud triangle*. Hasilnya mengindikasikan bahwa kecurangan pelaporan berkiatan dengan salah satu kondisi berikut: tekanan

finansial dari suatu perusahaan atau supervisor perusahaan, persentase yang lebih tinggi dari transaksi yang kompleks suatu perusahaan, integritas manajer yang dipertanyakan, dan hubungan yang kurang harmonis antara auditor dengan perusahaan.

Skousen *et al* (2009) melakukan pengujian empiris terhadap konsep *fraud triangle* yang diadopsi oleh SAS 99 untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Menggunakan data yang tersedia dalam laporan keuangan, Skousen *et al* (2009) mengidentifikasi lima proksi dari elemen tekanan dan dua proksi dari elemen kesempatan yang secara signifikan berhubungan dengan kecurangan. Disamping itu mereka menemukan bahwa pertumbuhan aset yang cepat, peningkatan kebutuhan uang tunai, dan pembiayaan eksternal berhubungan positif dengan kemungkinan terjadinya *fraud*.

Aspek kepemilikan saham eksternal dan internal kontrol dewan direksi juga terkait dengan peningkatan *fraud*. Disisi lain, peningkatan jumlah anggota komite audit yang independen terbukti dapat mengurangi terjadinya tindakan kecurangan.

Penelitian terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan memiliki hasil yang beragam. DeChow, Sloan, dan Sweeney (1996) menguji sejumlah 92 perusahaan yang melakukan manipulasi laba yang terkena tindakan oleh SEC (*Security Exchange Commission*). Mereka menguji motivasi perusahaan melakukan manipulasi laba, kemudian karakteristik tata kelola perusahaan yang terkait dengan peluang untuk melakukan manipulasi serta dampak dari tindakan manipulasi yang dilakukan perusahaan. Mereka menemukan bahwa keinginan untuk memperoleh pembiayaan yang murah merupakan motivasi utama bagi perseroan untuk memanipulasi kinerja finansial mereka. Disisi lain, struktur corporate governance yang lemah dan beban modal yang tinggi memberikan peluang dan tekanan bagi perusahaan.

Penelitian oleh Beasley (1996) masih berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan. Dia menggunakan analisis logit untuk mendeteksi apakah komite audit, komposisi direksi dan struktur corporate governance mempengaruhi kecenderungan kecurangan laporan keuangan. Beasley

menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan kecurangan. Temuan lainnya adalah kecenderungan kecurangan laporan keuangan akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah masa tugas direksi eksternal; menurunnya jumlah rangkap jabatan yang dilakukan oleh pihak direksi.

Hal senada diungkapkan oleh Fich dan Shivdasani (2007). Mereka menyelidiki dampak diungkapkannya kasus kecurangan perusahaan terhadap reputasi direksi eksternal yang duduk di perusahaan. Pasca terungkapnya skandal perseroan, direksi eksternal yang bertugas untuk melakukan pengawasan menjadi menurun reputasinya sehingga mengakibatkan menurunnya rangkap jabatan mereka di perusahaan lain. Tidak hanya itu, perusahaan lain tempat ireksi eksternal bekerja juga merasakan dampak negatif akibat menurunnya reputasi direksi tersebut..

Beneish (1997) mengembangkan model untuk mendeteksi pelanggaran prinsip akuntansi yang berterima umum melalui manajemen laba bagi perusahaan yang kinerja keuangannya kritis. Dasar penelitiannya adalah SAS 99 yang menyatakan bahwa deteksi terhadap perusahaan yang agresif dalam melakukan manajemen laba merupakan indikator potensial terjadinya kecurangan laporan keuangan. Temuannya mencatat bahwa beberapa ukuran seperti total akrua dibagi total aset, pertumbuhan penjualan, dan tingkat

leverage berguna untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan pelanggar prinsip akuntansi.

Di Indonesia, banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan publik dikarenakan masih banyak yang belum melakukan pengungkapan yang transparan dari berbagai transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya pemegang saham publik sering menjadi korban dari kurang transparannya manajemen. Salah satu referensi mengenai perbaikan terhadap transaksi ini datang dari temuan ROSC (*Report on the Observance of Standards and Code*) dari *corporate governance* country assessment yang dilakukan secara bersama antara *World Bank* dan *International Monetary Fund* (2004). Salah satu temuan menyatakan bahwa praktik transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada perusahaan publik di Indonesia masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi karena peraturan yang tidak jelas. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk memperkuat transaksi tersebut melalui perbaikan peraturan yang lebih komprehensif.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, yaitu terkait dengan (a) *Violation assesment* terhadap jenis-jenis kasus pelanggaran dan frekuensi pelanggaran

beserta tindakan yang diambil oleh regulator; (b) Identifikasi faktor-faktor pembentuk tiga pilar kecurangan (kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi) yang aplikatif dan bisa diukur; (c) Mendapatkan bukti empiris tentang keakuratan penerapan model deteksi kecurangan berbasis *fraud triangle*. Pengembangan model deteksi kecurangan selanjutnya dihubungkan dengan valuasi pasar serta model manipulasi laba riil untuk melihat komprehensifitas model; (d) Rumusan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis empiris yang dilakukan untuk perbaikan terhadap rerangka peraturan (*regulatory framework*) yang ada untuk meningkatkan prinsip *good corporate governance*.

Secara umum penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris terkait pengembangan model deteksi kecurangan berbasis *fraud triangle* pada kasus-kasus pelanggaran perusahaan publik di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Secara simultan terdapat perbedaan terkait faktor-faktor pembentuk *fraud triangle* antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.

H2: Secara parsial terdapat perbedaan terkait tekanan (*pressure*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.

H3: Secara parsial terdapat perbedaan terkait kesempatan (*opportunity*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.

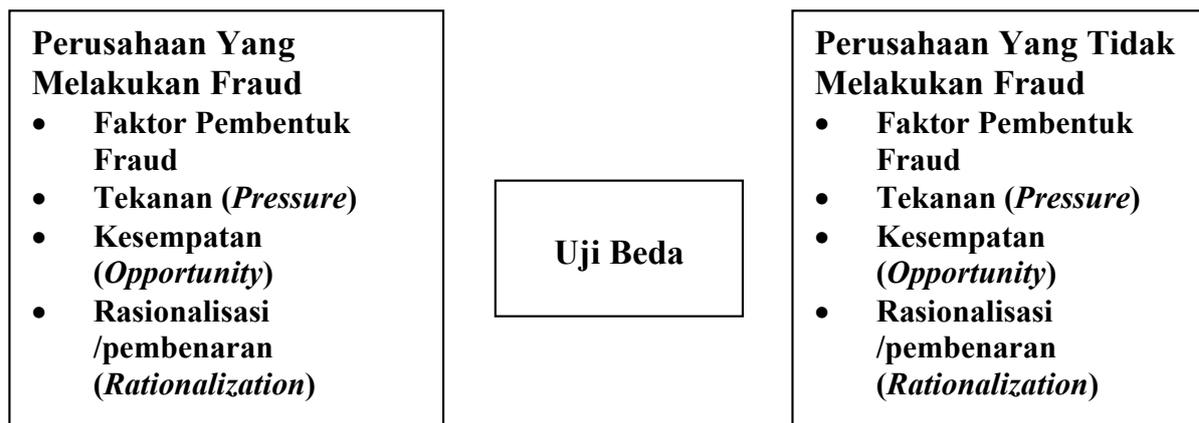
H4: Secara parsial terdapat perbedaan terkait rasionalisasi/pembenaran

(*rationalization*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.

Kerangka Berpikir

Dari uraian diatas dapat diilustrasikan ke dalam kerangka pemikiran teoritis :

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir



METODA PENELITIAN

Ruang Lingkup

Penelitian atau studi ini bermaksud melakukan mapping terjadinya kecurangan (*fraud*) berdasarkan *fraud triangle* untuk perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan membentuk model terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*.

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhadap perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara garis besar, terdapat dua kelompok sampel di dalam penelitian ini. Kelompok sampel pertama adalah perusahaan yang melakukan tindakan

pelanggaran dan kelompok sampel yang kedua sebagai pembanding adalah perusahaan non-pelanggar. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pertama adalah perusahaan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000 sebagai tahun awal pengamatan. Kemudian untuk kriteria yang kedua bagi perusahaan yang melanggar maka perusahaan tersebut harus masuk kedalam daftar resmi perusahaan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan laporan Bapepam-LK. Sedangkan perusahaan non-pelanggar akan dipilih perusahaan yang sepadan

dengan perusahaan pelanggar dalam hal kelompok industrinya dan ukurannya. Kriteria berikutnya, perusahaan tidak mengalami perubahan struktural secara signifikan seperti merger selama tahun pengamatan.

Identifikasi sampel perusahaan pelanggar aturan Bapepam-LK dilakukan dengan menelusuri rangkaian laporan Bapepam-LK mulai dari *press release*, laporan akhir tahun, serta laporan tahunan Bapepam-LK. Data tersebut didukung oleh dokumentasi tambahan dari berbagai media cetak dan elektronik yang ada.

Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui dua hal pokok. Pertama, analisis deskriptif melalui identifikasi telaah berbagai jenis pelanggaran (*corporate's regulatory violation assesment*) yang dilakukan oleh perusahaan publik selama lima tahun terakhir (2006-2010) yang bersumber dari laporan resmi Bapepam-LK. Telaah dilakukan dengan melakukan klasifikasi jenis dan sifat dari pelanggaran yang dilakukan perusahaan publik, serta nilai materiil pelanggarannya jika ada. Selanjutnya akan dianalisis penyelesaian oleh Bapepam-LK sebagai badan regulator pengawas pasar modal terhadap berbagai jenis tindak pelanggaran tersebut.

Tahap kedua akan dilakukan identifikasi faktor-faktor yang implementatif dari ketiga pilar utama kecurangan, yaitu kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi.

Ketiga pilar tersebut akan diurungkan menjadi berbagai variabel yang bersifat finansial, non finansial maupun yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang relevan dengan konsep dasar pilar kecurangan. Setiap variabel akan dibuatkan pengukurannya sehingga menjadi lebih operasional dalam pengujian empiris. Identifikasi variabel akan mengacu pada penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Salah satu acuan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah model penelitian dari

Pada tahap selanjutnya, keseluruhan variabel yang telah dikembangkan akan digabungkan kedalam suatu model deteksi kecurangan. Dalam melakukan deteksi akan dibandingkan antara perusahaan yang melakukan tindak pelanggaran (*fraud firms*) dan perusahaan yang tidak melakukannya (*non-fraud firms*). Dengan adanya perbandingan sampel tersebut akan diketahui keakuratan prediksi model. Untuk melaksanakan tahap ketiga ini, sebagai langkah awal perlu dilakukan pemilihan sampel dan penjelasan metodologi analisis statistik seperti yang dijelaskan pada sub bagian dibawah ini.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) dan perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah

tiga faktor pembentuk *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunities*), dan rasionalisasi/pembenaran (*rationalizations*). Tahapan pengukuran variabel penelitian

didasarkan pada penelitian Skousen et al. (2009) yang ringkasan variabelnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1.
Komponen *Fraud Risk* dan penjabaran variabelnya

Elemen <i>Fraud Triangle</i>	Kategori menurut SAS No.99.	Proksi variabel
Tekanan	Stabilitas Finansial	<ul style="list-style-type: none"> · Gross Profit Margin · perubahan penjualan - perubahan penjualan rata-rata industri · perubahan aset dua tahun sebelum pelanggaran · Penjualan/piutang · Penjualan/total aset · Persediaan/total aset
	Tekanan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> · Total Hutang/ total aset · (Kas Operasi-Capex)/ Aset lancar · Free cash flow
	Kebutuhan Finansial Personal	<ul style="list-style-type: none"> · % kepemilikan saham mayoritas · % kepemilikan saham direksi
Kesempatan	Target Finansial	<ul style="list-style-type: none"> · ROA
	Karakteristik Industri Pengawasan yang tidak efektif	<ul style="list-style-type: none"> · Piutang, Persediaan, Penjualan Asing · Proporsi Dewan Komisaris Independen · Jumlah komite audit · Proporsi komite audit independen · Keahlian komite audit
Rasionalisasi	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> · Perangkapan jabatan direksi diluar · Tingkat turnover direksi sebelum pelanggaran · Perubahan auditor eksternal · Opini audit

Sumber: Skousen et al. (2009)

Metoda Analisis Data

Analisis Deskriptif

Dalam hal ini akan dilakukan analisis deskriptif baik terkait dengan variabel.

Analisis secara kualitatif dilakukan pada tahap awal dengan melakukan identifikasi jenis dan item-item pelanggaran perusahaan sampai dengan penanganan terhadap pelanggaran tersebut. Berbagai ilustrasi tabel dan grafik

perbandingan dibuat untuk mendukung data dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif interpretatif.

Analisis Inferensial

Analisis secara kuantitatif melalui pengujian statistika dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Sedangkan pengujian statistik dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

a). Uji Beda

Uji beda dilakukan untuk menguji perbedaan karakteristik antara perusahaan yang melakukan kecurangan dan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

b). Analisis regresi logistik

Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dilakukan analisis regresi logistik. Regresi logistik merupakan regresi yang melakukan prediksi terhadap probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Dalam hal ini, regresi logistik dipilih sebagai alat analisis dalam penelitian ini karena variabel dependen merupakan variabel kategorikal yang pengukurannya dengan dummy (kode 1) untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) dan kode (0) untuk perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*). Persamaan regresinya dapat digambarkan sebagai

berikut:

$$FRAUD_i = \beta_0 + \beta_1 OPT_{it} + \beta_2 PRESS_{it} + \beta_3 RATIO_{it} + \epsilon \dots (1)$$

Keterangan:

- *FRAUD* : probabilitas terjadinya tindak kecurangan
- *OPT* : *opportunity* atau kesempatan
- *PRESS* : *pressure*
- *RATIO* : rasionalisasi
- ϵ : *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai data-data yang berhasil diperoleh dan pengolahan data-data tersebut dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil pengolahan data yang diperoleh akan ditelaah dan dijabarkan sesuai dengan hasilnya. Pembahasan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

Analisis Deskriptif

Berdasar Tabel 5.1 berikut dapat kita lakukan analisis deskriptif responden berdasarkan pengklasifikasian dua kelompok perusahaan, yaitu perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) dan perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*). Perusahaan yang melakukan *fraud* sejumlah 23 perusahaan (23%) sedangkan perusahaan yang tidak melakukan *fraud* sejumlah 75 perusahaan (77%).

Tabel 5.1
Demografi Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah	Prosentase
Jenis perusahaan	Melakukan <i>Fraud</i>	23	23%
	Tidak Melakukan <i>Fraud</i>	75	77%
	Total	98	100%

.Sumber: Data penelitian 2012

Analisis Inferensial

Penelitian ini juga menggunakan model regresi logistik untuk melihat kekuatan prediksi terhadap kategori peringkat. Tahap awal adalah memasukkan variabel ke dalam uji regresi logistik dengan menggunakan metode *Backward Stepwise*. Teknik *Stepwise* digunakan untuk menyaring variabel-variabel independen, kemudian mengeluarkan satu persatu dimulai dari variabel yang paling

tidak signifikan, sehingga akhirnya diketahui variabel yang paling signifikan.

Tahap terakhir adalah menguji kembali variabel yang signifikan dari uji regresi logistik teknik *Stepwise* kedalam uji selanjutnya, yaitu uji regresi logistik teknik *Enter*. Pengujian regresi logistik menghasilkan uji *Nagelkerke R Square*, uji *Hosmer and Lemeshow*, dan uji signifikansi untuk tiap-tiap variabel independen.

Tabel 5.2

Hasil uji Hipotesis Model Analisis Regresi Logistik

Persamaan Regresi Logistik					
$Y = -0.872 - 20.331 \text{ Audit Report}$					
Variabel	B	S.E	Wald	Df	Sig.
<i>Constant</i>	-.872	.248	12.327	1	.000
<i>AuditReport</i>	-20.331	8.987E3	0.000	1	0,000
Kategori	<i>Tidak Melakukan Fraud = 0 Melakukan Fraud = 1</i>				
Percentage Correct	0 %		100 %		
<i>N</i>			98		
Omnibus test of model coefficient			12.190		
-2 Log Likelihood Block 0			106.798		
-2 Log Likelihood Block 1			94.607		
Cox & Snell-R²			0.117		
Nagelkerke-R²			0.176		
Hosmer and Lemeshaw Test			0		
Chi Square			0.00		
Overall Percentage			98,6 %		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2012

Tabel 5.2 menunjukkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan alat analisis regresi logistik. Untuk menilai kecocokan model (*model fit*), kriteria yang digunakan adalah nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL). Awalnya hanya konstanta saja tanpa variabel menunjukkan nilai statistik *-2LogL* sebesar 106.798, namun setelah dimasukkan 10 variabel baru maka nilai *-2LogL* turun menjadi 94.607. Adanya penurunan yang signifikan nilai *-2LogL* dari 106,798 pada model awal menjadi 94,607 hal ini mengindikasikan bahwa model regresi ini baik. Hal ini berarti penambahan variabel *audit report* ke dalam model memperbaiki model fit.

Nilai *Cox* dan *Snell's R Square* dan Koefisien korelasi *Nagelkerke-R²* menunjukkan seberapa besar model ini

mempunyai kekuatan prediksi model yang dijelaskan oleh audit report, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini koefisien Nilai *Cox* dan *Snell's R Square* sebesar 0.117 dan Koefisien korelasi *Nagelkerke-R²* sebesar 0.176 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 17,6%.

Model fit dapat juga diuji dengan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit* yang menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness* sebesar 0.00 dan signifikansi 0.00, maka nilai tersebut di bawah 0.05 maka model dikatakan tidak fit dan model tidak dapat diterima.

Tabel 5.3
Hasil Klasifikasi Tabel
Classification Table^a

		Predicted		
		Fraud		Percentage Correct
Step 1	Fraud 0	75	0	100.0
	1	23	0	.0
Overall Percentage				76.5

a. The cut value is ,500

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2012

Classification table pada tabel 5.3 menunjukkan hasil kalasifikasi untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan yang salah. Menurut prediksi, perusahaan yang tidak

melakukan *fraud* (kode 0) adalah 75 perusahaan sedangkan hasil observasi menunjukkan 75 perusahaan, sehingga ketepatan klasifikasinya 100% (75/75). Sedangkan kita memprediksi

perusahaan melakukan *fraud* (kode 1) adalah 23 perusahaan sedangkan hasil observasinya adalah 0, sehingga ketepatan klasifikasinya 0% (0/23). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketepatan klasifikasi total adalah 76.5%.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini digunakan alat uji *Regresi Logistik*. Dalam hal ini, regresi logistik dipilih sebagai alat analisis dalam penelitian ini karena variabel dependen

merupakan variabel kategorikal yang pengukurannya dengan dummy (kode 1) untuk perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*) dan kode (1) untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*). Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat empat (4) hipotesis. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4.
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Arti	Hasil
H1	Tidak Terdapat Beda	Tidak Diterima
H2	Tidak Terdapat Beda	Tidak Diterima
H3	Tidak Terdapat Beda	Tidak Diterima
H4	Terdapat Beda	Diterima

Sumber: Hasil olah data 2012

Hasil pengujian regresi logistik (Tabel 5.2) menunjukkan bahwa secara simultan variabel *fraud triangle* tidak dapat digunakan untuk membedakan antara perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) maupun perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*). Hal ini ditunjukkan oleh hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness sebesar 0.00 dan signifikansi 0.00, maka nilai tersebut di bawah 0.05 maka model dikatakan tidak fit dan model tidak dapat diterima. Hal ini berarti

bahwa **hipotesis pertama (H1)** yang berbunyi “secara simultan terdapat perbedaan terkait faktor-faktor pembentuk *fraud triangle* antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*” **tidak diterima**. Hal ini berarti tidak terdapat beda antara perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) dengan perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*) terkait faktor-faktor pembentuk *fraud*.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa **Hipotesis 2** yang berbunyi “Secara parsial terdapat perbedaan terkait tekanan

(*pressure*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*” tidak diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) dengan perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*) terkait faktor tekanan (*pressure*).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa **Hipotesis 3** yang berbunyi “Secara parsial terdapat perbedaan terkait kesempatan (*opportunity*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*” tidak diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) dengan perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*) terkait faktor kesempatan (*opportunity*).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa **Hipotesis 4** yang berbunyi “Secara parsial terdapat perbedaan terkait rasionalisasi/pembenaran (*rationalization*) antara perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*.” diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) dengan perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*) terkait faktor rasionalisasi/pembenaran (*rationalization*).

Pembahasan

Dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hanya terdapat satu

variabel masuk ke dalam model (*variabel in equation*) karena memiliki nilai signifikansi di atas 0.05. Interpretasinya adalah bahwa semakin tinggi nilai audit report (*rationalization*), maka probabilitas perusahaan melakukan *fraud* juga semakin tinggi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat (H4) diterima karena audit report (*rationalization*) terbukti mempunyai kemampuan dalam membentuk model untuk memprediksi *fraud* suatu perusahaan.

Pressure

Sesuai dengan *SAS No. 99* terdapat empat jenis *pressure* yang terkait dengan *fraud* laporan keuangan. Empat jenis tersebut yaitu *financial stability*, *external pressure*, *managers' personal financial situations*, and *meeting financial targets*. Dalam penelitian ini kami mengambil satu proksi yaitu *financial stability*.

a. **Financial stability**

Sesuai dengan *SAS No. 99* manajer menghadapi tekanan (*pressure*) terkait *financial statement fraud* ketika *financial stability* dan/atau *profitability* terancam oleh ekonomi, *industry* ataupun kondisi operasi perusahaan. Loebbecke *et al.* (1989) and Bell *et al.* (1991) mengindikasikan bahwa dimana perusahaan mengalami pertumbuhan maka akan berada dibawah rata-rata industri sehingga manajer akan memanipulasi laporan

keuangan agar tampak lebih baik. Namun dengan cepatnya pertumbuhan perusahaan akan tetap memanipulasi laporan keuangan agar pertumbuhan Nampak lebih stabil. Kemudian terkait dengan gross profit margin (GPM), pertumbuhan penjualan (CATA) (Beasley 1996; Summers and Sweeney 1998), and pertumbuhan *asset* (Beneish 1997; Beasley *et al.* 2000) digunakan sebagai proksi dari *financial stability*. Albrecht (2002) and Wells (1997) menyimpulkan bahwa item atau akun dari neraca dan laporan laba rugi dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud*. Persons (1995) menyarankan agar *sales to accounts receivable*, *sales to total assets*, and *inventory to total sales* dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud*. Selain itu kita juga dapat menggunakan proksi yang lain yaitu $SALAR = Sales / Accounts\ receivables$; $SALTA = Sales / Total\ assets$ dan $INVSAL = Inventory / Total\ sales$.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *financial stability* terhadap *fraud*. Hal ini bertentangan dengan beberapa teori tersebut diatas.

b. External pressure

Kemampuan *exchange-listing requirements*, *repay debt or meet debt covenants* termasuk dalam *external*

pressure. Vermeer (2003) and Press and Weintrop (1990) melaporkan bahwa ketika dihadapkan dengan violation of debt covenants, manajer akan lebih menyukai untuk memeprecayai discretionary accruals. Kemudian debt levels berhubungan dnegan income increasing discretionary accruals (DeAngelo *et al.*1994; DeFond and Jiambalvo 1991). Manajer akan merasa berada di bawah tekanan sebagai hasil dari kebutuhan untuk memperoleh *additional debt or equity financing* untuk mampu bersaing. Sebagai contoh, perusahaan baru membutuhkan riset dan pengembangan atau perluasan faislitas. Dalam hal ini *leverage* merupakan salah satu proksi dari *external pressure*: $LEV = Total\ debt / Total\ assets$. Dechow *et al.* (1996) beragumen bahwa permintaan atas *external financing* tidak hanya tergantung pada *operating and investment activities* tetapi juga terkait pendanaan yang tersedia untuk perusahaan. Mereka menyarankan bahwa *the average capital expenditure* selama tiga tahun sebelum adanya manipulasi laporan keuangan merupakan pengukuran dari level investasi selama periode manipulasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh

external *pressure* terhadap *fraud*. Hal ini bertentangan dengan beberapa teori tersebut diatas.

c. *Financial targets*

Return on total assets (*ROA*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan indikasi *efficiently assets* dapat digunakan. *ROA* sering digunakan untuk mengukur penilaian kinerja manajer terutama terkait dengan bonus peningkatan dan sebagainya.. Summers and Sweeney (1998) melaporkan bahwa *ROA* secara signifikan mampu membedakan perusahaan yang melakukan *fraud* dan perusahaan yang tidak melakukan *fraud*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *financial targets* terhadap *fraud*. Hal ini bertentangan dengan beberapa teori tersebut diatas.

Opportunity

SAS No. 99 mengkalsifikasikan *opportunities* terkait dengan *fraud* atas laporan keuangan ke dalam tiga kategori. Tiga kategori tersebut yaitu *nature of industry*, *ineffective monitoring* dan *organizational structure*. Dalam hal ini penelitian ini hanya menggunakan 1 proksi dari *opportunity* yaitu variabel *nature of industry*.

a. *Nature of industry*

Nominal yang tercantum dalam akun di dalam laporan keuangan mayoritas

berdasarkan estimasi dan *subjective judgments*. Summers and Sweeney (1998) mencatat bahwa *uncollectible accounts* dan *obsolete inventory* ditetapkan secara subyektif. Mereka menyarankan bahwa manajemen harus focus pada beberapa akun yang berpotensi besar untuk dilakukan manipulasi. Konsisten dengan Loebbecke *et al.* (1989), yang melakukan observasi terhadap sejumlah *fraud* dalam sampel mereka yang terdiri dari *accounts receivable* and *inventory*. *SAS No. 99* and Albrecht (2002) mengindikasikan bahwa ketika perusahaan memiliki *significant operations located* dalam perbedaan *international jurisdictions* maka kesempatan terjadinya *fraud* akan meningkat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *nature of industry* terhadap *fraud*. Hal ini bertentangan dengan beberapa teori tersebut diatas

Rationalization

Rationalization merupakan jenis ketiga dari *fraud triangle* and paling sulit untuk dilakukan pengukurannya. Beberapa riset mengindikasikan bahwa kejadian terkait kegagalan audit dan peningkatan litigasi setelah adanya perubahan auditor (Stice 1991; St. Pierre and Anderson 1984; Loebbecke *et al.* 1989). Dalam hal ini penelitian kali ini

menggunakan *audit report* sebagai proksi dari *rationalization*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh audit report terhadap *fraud*.

Hal ini sesuai dengan teori tersebut diatas

Koefisien *Cox & Snell-R²*; *Nagelkerke-R²* maupun *Hosmer and Lemeshaw Test* yang menunjukkan bahwa model tidak fit. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel *fraud triangle* yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi tidak mampu membentuk model yang fit. Dengan kata lain ketiga variabel tersebut tidak cocok untuk membentuk suatu model, sehingga tidak memiliki kekuatan prediksi untuk membedakan antara perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) maupun perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*).

Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) maupun perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*). Hanya audit report sebagai proksi dari rasionalisasi (*rationalization*) yang membedakan antara perusahaan yang melakukan pelanggaran (*fraud*) maupun perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran (*fraud*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memberikan hasil bahwa dari empat hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini, hanya terdapat satu variabel masuk ke dalam model (*variabel in equation*) yaitu audit report sebagai proksi dari rasionalisasi (*rationalization*). Hipotesis pertama, kedua dan ketiga tidak diterima (ditolak) sedangkan hipotesis keempat diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai audit report (*rationalization*), maka probabilitas perusahaan melakukan *fraud* juga semakin tinggi.

Berikut ini merupakan keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan saran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih lanjut, yaitu :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat digunakan untuk membentuk model. Saran untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain untuk membentuk model.
2. Selain itu saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan rasio keuangan yang lain atau menggunakan pengukuran selain rasio keuangan untuk mengukur *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2002). *Consideration of fraud in a financial statement audit*. Statement on auditing standards No.99. New York, NY: AICPA.

- Apostolon, N. & Crumbley, D.L.(2005). Fraud surveys: lessons for forensic accounting. *Journal of Forensic Accounting*, 4: 103-118.
- Bapepam-LK. (2010). Laporan Tahunan 2009
- Bapepam-LK. (2009). Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412/BL/2009 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu
- Bapepam-LK. (2001). Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1. tentang transaksi afiliasi
- Bainbridge, Stephen M., 1999. *A Behavioral Economic Analysis of Mandatory Disclosure: A Thought Experiment Turned Cautionary Tale*. Working Paper
- Beasley, M.(1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, 71(4), 443–465.
- Beneish, M.(1997). Detecting GAAP violation: Implications for assessing earnings management among firms with extreme financial performance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(3), 271–309.
- Bower, J. & Gilson, S. (2003). *The Social Cost of Fraud and Bankruptcy*. Harvard Business Review, December 03.
- Cendrowski, H., Martin, J.P. & Pedro, L.W. (2007). *The Handbook of Fraud Deterrence*. John Wiley & Son, United States.
- CLSA (2007). CG Watch: Corporate Governance in Asia. Regional Special Report of CLSA in cooperation with Asian Corporate Governance Association (ACGA)
- Cooke, T.E. (1991). Disclosure in the Corporate Annual reports of Swedish Companies, *Accounting and Business Research*, 19, Spring, pp. 113-124.
- Cressey, D.(1953). Other people's money; a study in the social psychology of embezzlement. Glencoe, IL:FreePress.
- Dechow, P., Sloan,R., & Sweeney,A.(1996). Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by theSEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1–36.
- Deegan, C. (2000). *Financial accounting theory*. McGrawHill Publisher, 2nd Edition, Australia
- Farber, D.B.(2005). Restoring trust after fraud: Does corporate governance matter? *The Accounting Review*, 80(2), 539–561.
- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2007). Financial fraud, director reputation, and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics*. 86. 306-336
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2004). *Review of Corporate Governance in Indonesia*. Publication, dapat diakses melalui <http://www.fcgi.or.id>
- Gertner, R.H., Scharfstein, D.S, & Stein, J.C. (1994). Internal versus External Capital Markets. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(4), 1211-1230
- Hendriksen, Eldon S., & Van Breda, M. (1998). *Accounting Theory*, fifth edition, Irwin-McGraw-Hill

- Hirschey, M, John, K, & Makhija, A.M. (2009). *Advances in Financial Economics: Corporate Governance and Performance*. 1st edition, JAI Publishing, Emerald Group. Vol. 13
- Husnan, S. (2001). Indonesia in Zhuang J., David Edwards and Virginita A. Capulong (Eds.), *Corporate governance and finance in East Asia: a study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand* (Volume 2 pp.1-23). Asian Development Bank.
- Ikatan akuntan Indonesia. (2001). *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia per 1 April 2001*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta, edisi kedua.
- Jensen, M. C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure, *Journal of Financial Economics*, 3: 305–360.
- Kaminski, K., Wetzels, T., & Guan, L. (2004). Can financial ratios detect fraudulent financial reporting? *Managerial Auditing Journal*, 19(1), 15–28.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., and Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance* 54 No.2, 471-5178.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Zamarripa, G. (2003). Related lending, *Quarterly Journal of Economics*, 119, 231-268.
- Lo, Agnes W.Y., Wong, R.M.K., & Firth, M. (2009). Can corporate governance deter management from manipulating earnings? Evidence from related-party sales transactions in China. *Journal of Corporate Finance*, doi:10.1016/j.jcorpfin.2009.11.002
- Lou, Y.I., & Wang, M.L. (2009). Fraud Risk Factor of the Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Business and Economic Research*. Vol.7 (2), 62-66
- McCahery, J.A., & Vermeulen, E.P.M. (2005). *Corporate governance crises and related party transactions: a post parmalat agenda*. Working Paper University of Groningen, Netherland
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics*. 42: 335-370.
- Saudagaran, S.M., & Diga, J.G. (1997). Financial Reporting in Emerging Capital Market: Characteristics and Policy Issues, *Accounting Horizon*, Vol 11, No. 2.
- Skousen, C.J., Smith, K.R, & Wright, C.J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: the Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No.99; in *Advances in Financial Economics: Corporate Governance and Performance* 1st edition, JAI Publishing, Emerald Group. Vol. 13
- Skousen, C. J., & v Wright, C. (2008). Contemporaneous risk factors and the prediction of financial statement fraud. *Journal of Forensic Accounting*, IX, 37–62.
- Turner, J.L., Mock, T.J., & Sripastava, R.P. (2003). *An Analysis of the Fraud Triangle*. Working Paper.
- World Bank. (2004). *Report on the observance of standards and codes (ROSC)-Corporate governance country assessment Republic of Indonesia*. Available at <http://www.rru.worldbank.org/PapersLinks/Open.aspx?id>